EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG (STUDI PADA PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG)

Oleh:
Sanjaya A Manalu

ABSTRAK

Penurunan kualitas hidup dikawasan permukiman kumuh di Kota Bandung dapat menghambat perkembangan Kota Bandung. Khususnya menjadi penghambat visi Kota Bandung yaitu "Bandung Bermartabat dan Bandung Juara". Dalam hal ini kinerja pemerintah perlu dipertanyakan khususnya dalam program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung untuk melakukan penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menemukan penjelasan yang tepat dari setiap kegiatan dalam pelaksanaan program kebijakan lama dan kebijakan baru tentang penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang menjadi faktor pendukung untuk mengukur efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Hasil peneltian yang dilakukan telah sesuai dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031 dan RPJMD Kota Bandung 2014-2019. Tetapi pada pelaksanaannya masih kurang efektif, dimana pada target penataan permukiman kumuh di Kota Bandung telah ditetapkan 150 kawasan dalam jangka 5 Tahun. Pada Tahun pertama dan dan Tahun kedua awal program tersebut, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung hanya mampu merealisasikan 10 kawasan permukiman kumuh saja. Setara dengan 12,3 persen dari target perlima Tahun. Dalam hal pencegahan perkembangan permukiman kumuh di Kota Bandung oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dirasa masih belum efektif, mengingat perkembangan data perluasan permukiman kumuh di Kota Bandung terus mengalami peningkatan sekitar 24% per Tahun.

Faktor penghambat program penataan permukiman kumuh ini terdapat pada akuntabilitas, transparansi aparatur dan proses sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat.

Keyword**:** Efektivitas, RPJMD, RTRW, Realisasi, Target, Permukiman Kumuh.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang sejak lama dan berkepanjangan yang telah berkembang di kota-kota besar. Pemandangan atas permukiman kumuh atau permukiman yang tidak layak huni ini selalu kita temui disekitar lingkungan kita bahkan lingkungan permukiman kumuh tersebut termasuk dalam kategori permukiman kita sendiri tanpa kita sadari atau pahami. Banyak dampak-dampak negatif yang selalu hadir dari kawasan lingkungan permukiman kumuh ini, oleh sebab itu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan. Permasalahan permukiman kumuh yang masih tetap belum terminimalisir walaupun sudah berbagi cara yang dilakukan sudah menjadi masalah dan hambatan bagi pengembangan kota yang sehat, tertata dan bersih.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Undang-undang tersebut dapat diartikan yang dimaksud dengan permukiman kumuh dapat diukur dan

dianalisa melalui keadaan lingkungan kawasan permukiman tersebut. Setelah kita paham atas maksud dari tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 maka pembaca dapat meninjau atau melihat kawasan permukiman yang bisa dikatakan permukiman yang layak huni atau permukiman yang tidak layak huni (permukiman kumuh).

Permukiman-permukiman kumuh biasanya dapat kita jumpai dibantaran rel kereta api dan tengah pusat kota. Salah satu gambaran permukiman kumuh yang berada di kota besar sebagai berikut:

Permukiman Kumuh di Kecamatan Cicendo Kota Bandung



(Sumber: Peneliti, Tahun 2015)

Foto ini merupakan potret mengenai kondisi bangunan permukiman kumuh yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api. Terlihat bahwa bangunan tersebut jauh dari kelayakan, bangunan padat tidak adanya jarak antar bangunan, terbuat dari bahan bekas dan ketersediaan fasilitas umum tidak memadai. Dari hal tersebut meggambarkan kondisi pemukiman yang tidak layak huni dan menyebar hampir diseluruh penjuru kota. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di kota oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah untuk dijadikan tempat tinggal seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota dan di bawah jembatan. Foto ini di ambil di daerah Jatayu Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Di Indonesia, Jawa Barat khususnya Kota Bandung merupakan kota besar yang mempunyai masalah permukiman kumuh. Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman. Bahwa Pemerintah Daearah Kota Bandung pada pengembangan permukiman dan perumahan yang layak huni melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD sesuai tugas dan fungsinya.” SKPD yang dimaksud memilki tugas dan fungsinya dibidang penataan permukiman kumuh sesuai dengan RPJMD Kota Bandung 2014-2019 merupakan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.

Dan sesuai dengan LKPJ Kota Bandung 2012 pada bagian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 pada poin Prioritas Bidang Fisik bagian (G) yaitu:

“Pengembangan rumah susun dan penataan permukiman kumuh yang SKPD Utama merupakan Distarcip yang mempunyai Program Prioritasnya Pengembangan Rumah Susun dan Penataan kawasan permukiman Kumuh.” Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persoalan kawasan permukiman kumuh Kota bandung sudah dilakukan penanganan sejak lama dan merupakan masalah yang berkepanjangan di Kota Bandung. Sudah seharusnya masalah kawasan permukiman kumuh harus ditangani secara serius dengan tahap-tahap yang lebih akurat.

Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2014 dari 1556 RW, sebanyak 194 diantaranya termasuk ke dalam daerah permukiman kumuh. Dari 194 RW tersebut, 29 RW termasuk dalam kategori kumuh tinggi, 88 RW kumuh sedang dan 77 kumuh rendah.

Yang termasuk dalam daerah kumuh tinggi, yaitu Kecamatan Astanaanyar Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Tamansari, Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Sumur Bandung Kelurahan Braga dan Kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan Situsaeur. Dari hal di atas dapat di katakan hampir lebih setengah dari Kecamatan yang berada di Kota Bandung terkena permukiman kumuh, dari jumlah 26 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 153 Kelurahan yang berada di Kota Bandung.

Meluasnya kawasan kumuh berkorelasi dengan meningkatnya kepadatan penduduk yang pada Tahun 2011 saja telah mencapai angka 156 jiwa/hektar. Dengan angka pertumbuhan penduduk 1,59% pertahun. Terkait dengan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan perumahan, diketahui bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kota Bandung di Tahun 2012 baru mencapai 581.894 unit rumah dari target sebesar 648.730 unit. Berarti pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tingkat kepadatan penduduk dan ketersedian rumah layak huni masih mengalami peningkatan yang signifikan walaupun di imbangi dengan target rumah layak huni hampir sesuai dengan target pada Tahun 2012.

Di sisi lain berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kota Bandung pada tahun 2012 baru mencapai 2.494,5 m2 dari target sebesar 11.641 m2. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat rendah (MBR) jika dilihat dari target 11.641 m2 dan hanya terealisasi 2.494,5 m2 maka lebih dari 9.000 m2 belum terealisasi. Terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa masih sangat banyak permukiman kumuh yang perlu ditangani. Permukiman kumuh di Kota Bandung sangat memperihatinkan dimana permukiman kumuh mempunyai jenis tingkatannya yang dapat di identifikasi atau di analisis oleh setiap orang yang melihat atau sedang melakukan penelitian tentang pemukiman kumuh tersebut dengan memperhatikan ukuran permukiman kumuh yang dibahas dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2019.

Untuk sebagai indikator yang dapat di katakan permukiman kumuh tingkat tinggi sebagai berikut:

“Karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu daerah permukiman yang ketersediaan air bersihnya kurang dari 30 %, sistem drainase buruk, kondisi jalan lngkungan rusak parah lebih dari 70%, kepadatan penduduk lebih dari 100 unit rumah perhektar, tidak memiliki jarak antar bangunan dan perkembangan bangunan tinggi.”

(Sumber: RPJMD 2014-2019 Kota Bandung, 2015:73)

Dari indikator pengukuran tentang permukiman kumuh di atas masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui karakter kawasan permukimannya sendiri apakah termasuk permukiman layak huni atau permukiman tidak layak huni atau permukiman kumuh dalam kategori tinggi, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menganalisa permasalahan permukimannya dan mencegah menyebarnya permukiman kumuh tersebut.

Lingkungan permukiman yang termasuk dalam kawasan kumuh di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 tercatat hanya 18% saja kawasan kumuh yang ada, maka pada tahun 2012 tercatat bahwa 69,59% kawasan permukiman yang ada di Kota Bandung termasuk ke dalam kawasan kumuh (Sumber: RPJMD 2014-2019 Kota Bandung, 2015:203). Berdasarkan hasil *repost* RPJMD 2014-2019 tersebut dapat dianalisa bahwa pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 terjadi peningkatan kawasan permukiman kumuh sebesar 51%. Hal ini merupakan peningkatan yang cukup cepat dalam pertumbuhan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Hal ini perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Bandung ke depan. Dengan semakin besarnya penduduk yang ada

dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang baik (optimal) dapat dikatakan kawasan kumuh akan semakin meningkat Tahun ke Tahun berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung berada di 185 RW yang tersebar di 30 kecamatan. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui Surat Keterangan Walikota Nomor: 648/ Kep.455-distarcip/ 2010 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman kumuh di Kota Bandung. Berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhannya, permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan tinggi terdapat pada lima kecamatan yakni pada Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Sumur Bandung.

Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan program-program terkait dalam usaha perbaikan permukiman kumuh, diantaranya adalah program peningkatan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan, peningkatan kualitas lingkungan warga, bantuan untuk rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun, penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan telah dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap permukiman kumuh di Kota Bandung. (Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, 2013).

Dalam Instruksi Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 terdapat Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang memiliki kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ‘Bandung Juara’. Langkah-langkah dalam mewujudkan ‘Bandung Juara’ ini merupakan langkah yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan selaras dengan potensi sosial budaya, ekonomi dan kearifan lokal yang tertuang dalam rencana aksi. Dalam kaitannya dengan penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung, banyak kelompok kerja yang memiliki program dapat sejalan dengan penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung, diantaranya adalah program kampung juara yang didalamnya terdapat kegiatan seperti pembentukan komunitas warga pada setiap kampung, penyediaan MCK komunal, reservoar komunal dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan satu kampung untuk satu produk.

Program lainnya yang berhubungan dengan penanganan permukiman kumuh adalah program revitalisasi Bandung yang didalamnya terdapat kegiatan seperti bedah rumah masyarakat miskin, revitalisasi Kota tua Braga dan lain-lain. Untuk mewujudkan program penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung perlu pendekatan yang tidak hanya fokus terhadap pendekatan fisik namun perlu memperhatikan pendekatan terhadap karakteristik penghuni (masyarakat) yang tinggal dikawasan permukiman kumuh, karakteristik hunian, karakteristik prasarana pendukung perumahan penunjang dan karakteristik spasial permukiman kumuh tersebut untuk melihat faktor penyebab permukiman kumuh secara menyeluruh sehingga solusi yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Program penanganan baik fisik maupun non fisik dapat diselaraskan dengan program pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan seperti perwujudan ‘Bandung Juara’. Untuk menghasilkan solusi yang sesuai perlu diketahui karakteristik penghuni, hunian, sarana dan prasarana penunjang serta karakteristik spasial serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh di Kota Bandung.

Fokus penelitian ini terletak pada SKPD pelaksana program penataan permukiman kumuh Kota

Bandung. Persoalan bagaimana efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung. Dimana dijelaskan pada Rencana Teknis Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2004-2013 dan RPJMD 2014-2019 kota Bandung bahwa urusan perumahan yang SKPD utamanya merupakan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota Bandung. Dapat diartikan bahwa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota Bandung mempunyai peran penting dan fungsional dalam hal menanggulangi masalah-masalah permukiman kumuh atau dengan kata lain penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG (STUDI PADA PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG)".

Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas mengacu pada fakta dan fenomena tersebut, maka peneliti menganalisa serta membuat suatu pernyataan masalah *(problem statement)* tentang permukiman kumuh di Kota Bandung sebagai berikut: "Bagaimana Efektifitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Studi Pada Penataan Permukiman kumuh di Kota Bandung?"

Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui produksi organisasi dalam tingkat efektivitas organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam pelaksanaan SOP pada penataan permukiman kumuh Kota Bandung oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap penataan permukiman kumuh Kota Bandung oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui adaptasi organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terhadap penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengembangan yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terhadap penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya atau pun mahasiswa lain yang berminat mendalami studi tentang Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung studi pada Penataan Permukiman Kumuh di Kota Bandung.
2. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memperkaya referensi tentang efektivitas organisasi yang baik dan sebagai bahan informasi tentang Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta karya kota Bandung Studi Pada Penataan Permukiman Kumuh Kota Bandung.
3. Kegunaan bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan dan memahami tentang Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Studi Pada Penataan Permukaan kumuh.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan

masyarakat.Kemampuan pegawai yang ada di lembaga pemerintah sangat penting, arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa tunjangan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Setiap berbicara mengenai efektivitas maka mengarahkan kepada tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Richard. M. Steers yang menyatakan efektivitas adalah "Tujuan yang bergantung kepada seberapa berhasilnya suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkannya."(Steers, 1985:19).

Maksud dari pendapat Steers dapat dikatakan Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas organisasi merupakan "hubungan optimal antara produksi, kwalitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan" (Gibson dkk, 1996:28) dan menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly mengatakan: "kefektifan merupakan penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka lebih efektif kita menilai mereka". (Gibson dkk, 1993:25).

Gagasan tentang efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson dkk dalam bukunya Perilaku Struktur Proses, lebih mengarah pada tahap-tahap manajemen dan pengaturan fungsi-fungsi dari setiap struktur organisasi dengan memperhatikan kinerja (operasional) dengan keluaran yang dapat dihasilkan apakah sesuai harapan atau tidak acuan pada perpektif tujuan organisasi.

Memperhatikan pendapat dari para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas. Untuk efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:

1. *Input*
   Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.
2. Proses
   Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan.
3. Produktivitas
   Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi nungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktifitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.
   (Sedarmayanti, 2009:61).

Menurut pendapat ahli diatas tentang ukuran efektivitas merupakan hubungan antara beberapa indikator efektivitas yang saling mempengaruhi

satu dengan yang lain untuk mencapai suatu hasil akhir yang telah ditentukan. Pengertian dari input yang dimaksud di atas dapat dijelaskan bahwa dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.

Pengertian dari proses dapat dijelaskan bahwa proses merupakan kumpulan komponen sistem yang bekerja dengan tugas yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu hasil akhir. Pengertian dari hasil merupakan hasil akhir dari proses yang telah dilakukan untuk membandingkan rasio pengerjaan, masukan dan hasil yang keluar. Pengertian produktivitas merupakan suatu deskripsi dari input-proses-hasil. Produktivitas digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil produk yang telah dikeluarkan guna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan manejemen produksinya.

Ukuran Efektivitas

Kriteria jangka pendek adalah kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah diterapkan jika anda menilai kefektifan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam jangka waktu yang lebi lama, umpamanya lima tahun. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Berikut kelima kategori umum kefektifan mulai dengan dimensi waktu jangka pendek:

1. Produksi

   Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualiatas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.konsep ini mevniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, mahasiswa yang lulus, pasien yang dipulangkan, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan atau rekanan organisasi yang bersangkutan.
2. Efisiensi

   Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini menfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dsan proses. Ukuran-ukuran efisiensi antara lainkeuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, tingkat hunian, biaya per pasien, per mahasiswa danper rekanan. Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan), yang dalam bentuk umum ialahrasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang dipergunakan.
3. Kepuasan

   Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para persertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita mengunakan istilah kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini. Ukuran kepuasan mencakup sikap karyawan, pergantian karyawan, keabsenan, kelambanan, dan keluhan.
4. Keadaptasian

   Keadaptasian ialah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasaian dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkunagan, termasuk perubahan dalam tubuh organisasi. Ketidakefektifan dalam

mencapai produksi, ketidakefisienan dan ketidakpuasan merupakan pertanda perlunya adaptasi praktek dan kebijaksanaan manejerial. Tuntutan atas keluaran dan penyediaan masukan yang berada dalam lingkungan, mengharuskan adanya perubahan. Jika sampai tindakan tertentu organisasi tidak dapat atau tidak beradaptasi, maka kelangsungan hidupnya dalam bahaya.

5. Pengembangan

   Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manejerial, tetapi akhir-akhir ini cara pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.

   (Gibson, 1993:32-35)

Yang dimaksudnya dengan pernyataan atas produksi diatas merupakan sebagai salah satu kriteria keefektifan produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Dari pernyataan diatas tentang efisiensi merupakan sebagai salah satu kriteria keefektifan, efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langkah oleh organisasi.

Menurut pernyataan diatas tentang kepuasan merupakan sebagai salah satu kriteria keefektifan, kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Dari pernyataan tentang keadaptasian merupakan sebagai salah satu kriteria keefektifan, keadaptasian adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan.

Dari pernyataan tentang pengembangan sebagai salah satu kriteria kefektifan, pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Kelima kriteria tersebut merupakan gabungan dari kriteria pengukuran keefektifan orgnanisasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara umum yang dikemukakan oleh Gibson dkk.

Kriteria Permukiman Kumuh

Permukiman merupakan suatu kawasan lingkungan perumahan dimana masyarakat bertempat tinggal dan berkeluarga atau dalam kata lain permukiman menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang sering disebut dengan (sandang, papan dan pangan) permukiman merupakan hal yang sama dengan papan yaitu tempat dimana mereka tinggal. Permukiman pada hakikatnya wajib mempunyai keanekaragaman bentuk atau standar dan fasilitas permukiman yang seiring dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial yang memiliki permukiman tersebut. Oleh sebab itu permukiman yang identik dengan finansial rendah tidak jarang bertempat tinggal yang sering disebut permukiman kumuh.

Pada umumnya fenomena permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 22 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan bahwa: Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni antara lain

karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Menurut Undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi permukiman kumuh dapat mengakibatkan dampak-dampak negatif terhadap sesama penghuninya, dapat dikatakan dampak negatif tersebut masalah sosial, kesehatan dan masalah ekonomi.

Dari pendapat uraian atas mengatakan bahwa permukiman kumuh dapat di lihat dari aspek fisik (bangunan), ekonomi dan lingkungan sosial suatu kawasan yang saling berhubungan antara ketiga aspek tersebut. Biasanya permukiman kumuh sejalan dengan lingkungan sosial yang rendah dan ekonomi rendah.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Metode deskriptif digunakan peneliti dan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deksriptif ini bertujuan untuk menemukan penjelasan yang tepat dari setiap kegiatan dalam pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kota Bandung**.** Peneliti akan melakukan pengumpulan fakta dan identifikasi terhadap pelaksaanaan program kebijakan lama dan kebijakan baru pada program Penataan Permukiman Kumuh di Kota Bandung berdasarkan faktor yang menjadi pendukung untuk mengukur efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, kemudian merangkum sejumlah data-data yang masih mentah dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat diinterpretasikan oleh peneliti.

Tehnik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, di mana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini informan penelitian terbagi atas dua bagian yaitu pihak aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dan pihak masyarakat yang merasakan penataan permukiman kumuh di Kota Bandung

Teknik Pengunpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi acuan peneliti serta diktat perkuliahan, artikel, buku-buku dan dokumentasi lainnya untuk dikumpulkan sebagai bahan acuan yang dijadikan landasan dalam menyusun penelitian tentang Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Studi Pada Penataan Permukiman Kumuh di Kota Bandung.

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota Bandung yang beralamat di Jl.Cianjur No. 34 Bandung pos 40195 Telp. (022) 7217451 dan didaerah permukiman kumuh yang berada di Kota Bandung.

HASIL PENELITIAN

Kota Bandung berada di Propinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak pada 107° Bujur Timur dan 06°55’ Lintang Selatan yang meliputi 30 kecamatan, yaitu kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Kiara Condong, Batununggal, Lengkong, Regol, Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Margacinta, Arcamanik, Ujungberung, Cibiru, Rancasari, Cicadas dan Bandung Kidul. Berikut ini Peta Kota Bandung dengan batas-batas kecamatannya di Kota Bandung:

Secara administratif Kota Bandung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Padalarang dan Cimahi.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Luasan permukiman di Kota Bandung merupakan ukuran kepadatan penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang dapat diklasifikasikan menurut wilayah perkecamatan yang ada di Kota Bandung. Tabel luasan wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Kota Bandung Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bandung Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Sukasari	6,27	66.578	10.619
2	Sukajadi	6,01	100.244	23.313
3	Cicendo	7,27	99.452	14.497
4	Andir	3,74	103.975	28.026
5	Cidadap	6,12	52.209	8.545
6	Coblong	7,22	124.121	16.667
7	Bandung Wetan	3,39	31.714	9.355
8	Sumur Bandung	8,74	39.383	11.583
9	Cibeuying Kaler	9,71	68.145	15.143
10	Cibeuying Kidul	3,35	110.012	20.955
11	Kiara Condong	4,36	128.121	20.935
12	Batununggal	4,89	122.345	24.323
13	Lengkong	6,12	72.059	12.193
14	Regol	5,18	83.713	19.468
15	Astana Anyar	11,39	70.648	24.446
16	Bojongloa Kaler	5,46	118.898	39.240
17	Bojongloa Kidul	3,03	79.476	12.696
18	Babakan Ciparay	4,30	137.392	18.442
19	Bandung Kulon	3,30	125.369	19.407
20	Antapani	4,00	108.245	12.499
21	Arcamanik	6,40	68.860	7.816
22	Ujungberung	6,61	84.931	8.214
23	Cibiru	7,27	89.201	8.252
24	Rancasari	9,34	72.309	5.490
25	Cicadas	6,40	112.325	10.333
26	Bandung Kidul	3,03	65.450	10.800
Jumlah		**176,56**	**2.329.928**	**413.257**

(Sumber: BPS (Sesudah diolah oleh DISTARCIP) Tahun 2012)

Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2012 adalah 2.329.928 jiwa dengan Kecamatan Babakan Ciparay merupakan kecamatan terbanyak penduduknya yaitu berjumlah 137.392 orang, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Bandung Wetan yaitu 31.714 orang. Kepadatan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2012 adalah 413.257 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bojongloa Kaler yaitu sebesar 39.240 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rancasari yaitu sebesar 5.490 jiwa/Ha.

Sebagian besar kecamatan di Kota Bandung memiliki kepadatan

penduduk >10000 jiwa/km2, yang meliputi kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Coblong, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Kiara Condong, Batununggal, Lengkong, Regol, Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Antapani, Cicadas dan Bandung Kidul. Sedangkan kecamatan Cidadap, Bandung Wetan, Arcamanik, Ujung Berung, Cibiru dan Rancasari memiliki kepadatan penduduk antara 5000-10000 jiwa/km2.

Kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung pada Tahun 2012 dapat disajikan dalam data luasan permukiman kumuh perkecamatan pada Kota Bandung menurut wilayah permukiman kumuh dengan luas (Ha) serta persentasenya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Luas Permukiman Kumuh Kota Bandung Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Wilayah Pengembangan Bojonegara		**88.385**	**12.06**
1	Andir	12.872	1.76
2	Cicendo	29.888	4.08
3	Sukajadi	45.625	6.22
Wilayah Pengembangan Cibeunying		**111.461**	**15.21**
4	Bandung Wetan	10.75	1.76
5	Cibeunying Kaler	32.764	4.47
6	Cibeunying Kidul	17.472	2.38
7	Cidadap	20.951	2.38
8	Coblong	26.79	3.65
9	Sumur Bandung	2.734	0.37
Wilayah Pengembangan Gedebage		**159.363**	**21.74**
10	Bandung Kidul	13.592	1.85
11	Margacinta	102.30	13.96
		4	
12	Rancasari	44.955	6.13
Wilayah Pengembangan Karees		**98.876**	**13.49**
13	Batunuggal	27.666	3.77
14	Kiara Condong	33.624	4.59
15	Lengkong	3.924	0.54
16	Regol	33.662	4.59
Wilayah Pengembangan Tegallega		**201.137**	**27.44**
17	Astana Anyar	1.97	0.27
18	Babakan Ciparay	78.312	10.68
19	Bandung Kulon	42.131	5.75
20	Bojongloa Kaler	37.486	5.11
21	Bojongloa Kidul	39.75	5.42
Wilayah Pengembangan Ujung Berung		**73.714**	**10.06**
22	Arcamanik	14.028	5.42
23	Cibeunying Kidul	0.934	0.13
24	Cibiru	8.403	1.15
25	Cicadas	35.653	4.86
Total		**732.936**	**100**

(Sumber: DISTARCIP, 2015)

Luas permukiman kumuh di Kota Bandung tahun 2012 adalah 732.936 ha, dengan luas terbesar terdapat di Wilayah Pengembangan Tegallega yaitu sebesar 201.137 ha (27.44%), sedangkan luas permukiman kumuh terkecil terdapat di Wilayah Pengembangan Ujung Berung yaitu sebesar 73.714 ha (10.06%). Sementara itu bila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Margacinta merupakan kecamatan dengan luas permukiman kumuh terbesar, yaitu 102.304 ha (13.96%) sedangkan Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki luas permukiman kumuh terkecil, yaitu 0.934 ha (0.13%).

Di sisi lain berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kota Bandung

pada tahun 2012 baru mencapai 20.494,5 m2 dari target sebesar 110.641 m2. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat rendah (MBR) jika dilihat dari target 110.641 m2 dan hanya terealisasi 20.494,5 m2 maka lebih dari 90.000 m2 belum terealisasi.

Sedangkan pada Tahun 2014 untuk realisasi penataan permukiman kumuh sudah dilakukan pada tahap perencanaan yang matang diantaranya hubungan kerjasama antara Dinas Tata ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan dinas-dinas instansi yang terkait yang diharapkan bisa membantu untuk mengurus dan memperlancar program tersebut.

Dan untuk realisasi penataan permukiman kumuh Tahun 2014 sampai dengan pertengahan Tahun 2015 sesuai dengan RPJMD Kota Bandung 2014-2019 tentang *point* penataan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan jangka waktu 5 Tahun. Pada proporsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam jangka waktu 5 Tahun untuk target kerja program penataan permukiman kumuh mempunyai kebijakan untuk melakukan penataan permukiman kumuh yang menyebar di 30 Kecamatan dengan target lebih spesifiknya adalah 150 kawasan permukiman kumuh yang berada di Kota Bandung.

Penataan permukiman kumuh di Kota Bandung pada Tahun 2014-2015 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah merealisasikan penataan permukiman pada 10 kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung. Dari target penataan permukiman kumuh yang ditetapkan pada Tahun kerja 2014-2015 sebanyak 13 kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Sepuluh kawasan yang telah terealisasi tersebut adalah kawasan Kelurahan Ciroyom 1 Kecamatan Andir, Kelurahan Ciroyom 8 Kecamatan Andir, Kelurahan Babakan Ciparay 6 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Taman Sari 6 Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Taman Sari 11 Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Cikutra 6 Kecamatan Cibeuying Kidul, Kelurahan Kebon Jayanti 2 Kecamatan Kiara Condong, Kelurahan Babakan 4 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Surabaya 5 Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Babakan Surabaya 6 Kecamatan Kiara Condong.

Berikut ini tabel luasan penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang sudah terealisasi Tahun 2014-2015.

Realisasi Luasan Penataan Permukiman Kumuh di Kota Bandung 2014-2015

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas (M2)	Area (H)
1	Ciroyom 1	Andir	13.527,04	1,3527
2	Ciroyom 8	Andir	36.032,56	3,60326
3	Babakan Ciparay 6	Babakan Ciparay	26.193,03	2,6193
4	Taman Sari 6	Bandung Wetan	17.185,38	1,71854
5	Taman Sari 11	Bandung Wetan	33.888,60	3,38886
6	Cikutra 6	Cibeuying Kidul	33.689,58	3,36896
7	Kebon Jayanti 2	Kiara Condong	13.313,56	1,33136
8	Babakan 4	Babakan Ciparay	35.892,67	3,58927
9	Babakan Surabaya 5	Kiara Condong	32.159,07	3,21591
10	Babakan Surabaya 6	Kiara Condong	34.791,65	3,47917
Jumlah			**276.673,14**	**27,66733**

(Sumber: DISTARCIP, 2015)

Pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung pada Tahun 2014-2015 adalah luasan sebanyak 276.673,12 m2 atau 27,66733 hektar yang menyebar di 10 Kelurahan yang ada di Kota Bandung. Dalam pencapaian ini jika dibandingkan pada Tahun 2012 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung hanya dapat merealisasikan 20.494,5 m2 dari target 110.641 m2.

Perbedaan penataan permukiman kumuh Tahun 2012 dengan Tahun 2014-2015 adalah kuota kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung. Jika diamati laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pemukiman, masyarakat yang melakukan urbanisasi, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat *non* domisili (Surat Keterangan Berdomisili) di Kota Bandung yang setiap Tahun selalu meningkat.

Produksi Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Pada Penataan permukiman Kumuh di Kota Bandung

Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung merupakan produk dari pelayanan dan penyuluhan dari aparatur kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan antara input dan output, usaha dengan hasil yang dicapai, dan pencapaian program kerja yang telah dicapai saat ini.

Anggaran yang telah ditetapkan oleh pusat untuk program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung belum berjalan efektif, berdasarkan hasil penelitian melalui warga, bahwa pelayanan yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dirasa masih banyak kekurangan, mulai dari alat-alat, sosialisasi penataan, peninjauan kawasan permukiman kumuh, dan sarana fasilitas air bersih, kamar mandi umum dan saluran drainase dikawasan permukiman kumuh, padahal anggaran sangatlah besar. Mengenai target atau sasaran yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada Tahun 2014-2019 dan juga target pada Tahun 2014 untuk penataan permukiman kumuh Kota Bandung dapat dilihat pada hasil wawancara peniliti dengan kepala bidang perumahan sebagai berikut:

> Untuk target kita Tahun 2014-2015, kita mempunyai target 13 kawasan permukiman kumuh dari target kita sebesar 150 kawasan selama RPJMD 2014-2019 atau selama 5 Tahun kedepan. Memang kita dalam Tahun ini mempunyai target yang terbilang cukup kecil, tapi dalam hal bekerja kan kita harus balance, dimana pekerjaan kita dibidang perumahan bukan cuma satu masih banyak dan semua pekerjaan kita adalah pekerjaan prioritas. (25/06/2015)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa target penataan permukiman kumuh di Kota Bandung dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Target Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

No	Tahun	Target (kawasan)	Persentase (%)
	2014 s/d 2019	**150 kawasan**	**100 %**
1	**2014-2015**	**13 kawasan**	**8.6%**

(Sumber: Peneliti, 2015)

Dari hasil peneliti menganalisa target Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam penataan permukiman kumuh Kota Bandung pada Tahun 2014-2019 sebanyak 150 kawasan permukiman kumuh yang menyebar di 30 kecamatan diseluruh Kota Bandung. Untuk target pada Tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung menargetkan 13 kawasan permukiman kumuh yang menyebar disetiap kecamatan, yaitu: dikawasan Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk target Tahun 2014 ini memang terbilang sangat kecil hanya

8.6% dari target per 5 Tahun dibandingkan dengan target dalam pencapaian 2014-2019 sebanyak 150 (100%) kawasan. Dan peneliti menganalisa seharusnya target pencapaian pertahun untuk kawasan permukiman kumuh Kota Bandung yang lebih efektif adalah dikisaran 29 kawasan sampai dengan 31 kawasan pertahunnya atau sekitar 21% target pertahun.

Efesiensi Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Pada Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (DISTARCIP) merupakan dinas yang berdiri sendiri dan berfungsi untuk melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat Kota Bandung terlebih khususnya dalam tata ruang dan penataan permukiman serta penataan letak tata Kota. Dalam hal ini aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung diharuskan dapat bekerja secara efisien dan kreatif untuk memenuhi pencapian target kerja mereka.

Tingkat Kepuasan Yang Diperoleh Organisasi Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Pada Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

Kepuasan yang didapat dari aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sendiri bermacam-macam, karena didalam Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tidak diterapkannya reward bagi aparatur yang berprestasi, tetapi aparatur mendapatkan kepuasan lain, baik itu secara materi atau batin. Selain anggota kelompok organisasi, adapula kelompok masyarakat yang mendapatkan kepuasan dari hasil pelayanan.

Kepuasan materi yang didapatkan oleh anggota organisasi di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung merupakan kepuasan yang bisa dirasakan dan didapat melalui gaji yang didapat. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa aparatur di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mendapat gaji yang cukup besar, sesuai dengan kinerja mereka, berdasarkan informasi bahwa gaji pegawai di bagian UPT Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung cukup untuk kehidupan mereka, itu artinya kepuasan yang didapat anggota kelompok dari materi cukup bagus.

Sedangkan kepuasan batin yang didapat oleh anggota kelompok organisasi adalah apabila organisasi di dalam Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bisa menjalankan program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang telah direncanakan bisa mencapai sebuah tujuan, yaitu perwujudtan kawasan lingkungan permukiman yang tertata rapi dan sehat.

apabila penataan permukiman kumuh sudah bisa terpenuhi seluruhnya, maka program yang telah dijalankan bisa dikatakan efektif. Oleh sebab itu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dapat mencapai program tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan kepuasan batin. Seperti yang diutarakan oleh salah satu aparatur yang melakukan pelayanan penyuluhan permukiman kumuh di Kota Bandung sebagai berikut: “Kalau tingkat kepuasan dari kami sih, kami senang kalau kawasan permukiman kumuh dapat teratasi dengan cepat, dan kami juga senang apabila program kami bisa sesuai target, dan dari materi sih ya saya kira kami cukup puas.” (25/06/2015)

Dan mengenai hasil wawancara dari sebagian masyarakat di sekitar kawasan penataan permukiman kumuh bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang tingkat kepuasan aparatur sebagai berikut: saya tidak tahu persis puas atau tidak puasnya aparatur dalam menjalankan tugas, saya tidak ngerti mas. (28/06/2015)

Dari pernyataan diatas dapat terlihat bahwa masyarakat kurang begitu tahu atau kurang begitu mengerti apa yang dikatakan kepuasan aparatur karena mereka hanya menerima bantuan penataan kawasan permukiman saja. Dari penerimaan penataan

permukiman kumuh tersebut bahwa masyarakat cukup senang dengan adanya bantuan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan mereka tanpa mengetahui standar pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tata ruang dan Cipta Karya tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dikawasan Kelurahan Taman Sari kepada masyarakat yang kena dampak penataan permukiman kumuh di Kota Bandung sebagai berikut: saya cukup senang mass, dengan adanya pertolongan pembangunan jalan, sehingga motor bisa masuk dengan leluasa kedepan rumah saya .(28/06/2015). Saya cukup senang mass, dengan adanya pembangunan drainase didepan rumah saya, sehingga pada musim hujan rumah saya tidak akan banjir lagi. (29/06/2015)

Menurut analisis peneliti, dapat dikatakan tingkat kepuasan pada masyarakat yang sudah mendapatkan penataan permukiman kumuh sudah cukup puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung di kelurahan Taman Sari, Bandung.

Keadaptasian Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Pada Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

Kemampuan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda disetiap lingkungan yang berbeda pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung. Dalam pernyataan ini yang dimaksud dengan penataan permukiman kumuh disetiap kawasan atau lingkungan berbeda-beda.

Seperti penataan permukiman yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Tamansari dan Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya.

Kedua kelurahan ini memiliki struktur lingkungan yang berbeda oleh sebab itu dalam penanganannya juga berbeda, Kelurahan Taman Sari merupakan lingkungan permukiman kumuh yang mayoritas lingkungan untuk bermukim berbeda dengan kelurahan Babakan Surabaya yang kawasan permukiman Kumuhnya sebagai tempat bermukim dan juga sebagai pasar tempat mereka menggantungkan hidup melalui kegiatan perekonomian pasar tradisioanal.

Oleh sebab itu aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung perlu mengadaptasikan atau menyesuaikan implementasi program penataan permukiman kumuh di dua atau lebih permukiman kumuh tersebut. Supaya masyarakat dapat menerima program ini dengan baik dan juga aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dapat bekerja dengan maksimal.

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam pelaksanaan program pentaan permukiman kumuh di Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya hal-hal yang tidak sesuai harapan sering terjadi dikarenakan banyak pendapat yang kontra bahkan perlawanan dengan aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Ketika aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung melaksanakan programnya dan turun langsung ke kawasan permukiman kumuh.;

seketika pemetaan dan pola tata ruang dijelaskan untuk kawasan tersebut banyak masyarakat yang tidak sepakat karena dalam pemetaan dan pengukuran pola ruang tersebut banyak hal yang harus dikorbankan demi mendapatkan syarat permukiman yang tertata, sehat dan rapi.

Seperti penataan permukiman yang dilakukan di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Tamansari, pada dasarnya permukiman kumuh kawasan Kelurahan Taman Sari kekumuhannya disebabkan oleh struktur fisik bangunan yang merapat, sehingga untuk saluran drainase dan jalan-jalan begitu sempit bahkan tidak ada sama sekali drainasenya. Pada saat itu aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung meninjau kawasan tersebut,

dengan berbagai kebijakan penanganan direncanakan, akan tetapi masyarakat tidak mau menerima begitu saja perencanaan tersebut dikarenakan sebagian masyarakat merasa mendapatkan dampak negatif karena pemerataan atau pengambilan sebagian tempat bermukim mereka untuk dijadikan jalan umum ataupun drainase.

Dalam hal ini aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dituntut untuk dapat mengadaptasikan perubahan perencanaan, demi untuk membuang pemikiran masyarakat terhadap *image* aparatur atau pemerintah yang selama ini hanya dapat memaksa atau mentereantarkan masyarakat untuk suatu kebijakan.

Di suatu sisi aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam program penataan permukiman kumuh di tempat perbelanjaan tradisional yang berada di Kecamatan Andir telah melakukan adapatasi secara efektif tentang ketanggapan terhadap kawasan lingkungan kumuh pasar Ciroyom.

Dalam penataan tersebut aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas pasar Kota Bandung untuk membuat suatu inovasi pembangunan dan pengaturan pola struktur bangunan pasar yang bersih, tertata dan rapi. Berikut ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan masyarakat atau pedangang di pasar Ciroyom tentang tanggapan mereka terhadap penataan permukiman pasar di Ciroyom:

> Kami sangat senang pak, dengan keberadaan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam perbaikan, pembangunan pasar kami menjadi lebih nyaman dan bersih. (2/07/2015)
>
> Saya sangat senang dengan pembedahan lingkungan pasar kami mass, biasanya kami kalau jualan itu harus mendirikan tenda terlebih dahulu, tetapi sekarang kami tidak perlu mendirikan tenda lagi. (2/07/2015)
>
> Menurut saya sesuai aja mass, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kutipan yang kami berikan selama ini. (2/07/2015)

Dari beberapa pendapat masyarakat yang berada di pasar Ciroyom terhadap kinerja aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam ketanggapan aparatur terhadap perubahan setiap lingkungan sudah berjalan dengan efektif. Karena aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dapat bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat yang berbeda di setiap lingkungan. Salah satunya penataan permukiman kawasan pasar Ciroyom.

Pengembangan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung Pada Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Bandung

Dalam hal ini pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung lebih kepada pencegahan pemekaran permukiman kumuh. Sesuai dengan perkembangan-perkembangan
Permukiman kumuh setiap Tahunnya di Kota Bandung terus meningkat. Pengembangan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung semenjak Tahun 201 hanya berdasarkan cara sosialisasi saja.

Tanpa pengawasan permukiman yang optimal. Hal ini dapat dikatakan pengembangan sudah dijalankan oleh aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tapi menurut kinerja atau inovasinya kurang efektif. Karena dalam hal ini pencegahan lebih baik daripada pengobatan dalam konteks penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terkait pengembangan penataan permukiman kumuh di Kota Bandung dalam hal pencegahan serta pengawasannya:

> Berbicara tentang pencegahan dek, mengingat luasan wilayah permukiman di Kota Bandung cukup

luas untuk dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi perkembangan permukiman kumuh dan mengingat sumber daya aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang tidak memadai dalam konteks pengawasan. Diharuskan aparatur dalam hal pengawasan berjumlah 150 aparatur untuk daerah yang diduga akan mengalami peningkatan permukiman kumuh di Kota Bandung sebanyak 130 Kelurahan yang menyebar di Kota Bandung. (25/06/2015)

Dari pernyataan ketua pelaksana penataan permukiman kumuh tersebut. Dapat dikatakan optimisme dalam pencegahan perkembangan permukiman kumuh sangat kurang baik. Dimana dalam pencegahan masih banyak inovasi-inovasi yang dapat dimunculkan. Masalah pemberdayaan masyarakat juga sangat dipentingkan dalam hal pengawasan terhadap pengawasan peningkatan permukiman kumuh tersebut.

Dalam hal ini aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam potensinya dalam pencegahan peningkatan permukiman kumuh telah melakukan kerjasama dengan satuan polisi pamong praja yang berada disetiap kecamatan di Kota Bandung dan setiap kepala kelurahan yang diberikan wewenang untuk melaporkan setiap kejanggalan yang berada kawasan permukiman. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung kasie pengawasan penataan permukiman kumuh Kota Bandung:

Pengawasan yang kita lakukan untuk pencegahan peningkatan permukiman kumuh di Kota Bandung adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan ke setiap daerah yang diduga mengalami peningkatan permukiman kumuh. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan satpol PP kalau memang diharuskan apabila masyarakat tetap bersikeras jika dilakukan penyuluhan dan pembongkaran bangunan yang ilegal milik masyarakat. Untuk mengetahui tempat bermukim masyarakat legal atau tidak legal kita melibatkan kepala kelurahan untuk menferifikasinya. (25/06/2015)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sudah tegas dan efektif dengan melibatkan instansi lain yang terkait. Tetapi pada kenyataannya peningkatan permukiman kumuh di Kota Bandung terus meningkat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung kasie pengawasan:

Memang dalam pelaksanaannya kita kurang efektif dikarenakan untuk melakukan pengawasan ini diperlukan aparatur yang dapat bekerja mandiri untuk diturunkan kebeberapa kawasan yang diduga megalami peningkatan. Disisi lain juga peningkatan permukiman kumuh harus ditinjau dari bagian instansi kependudukan yaitu catatan sipil, karena selama ini kita melakukan pengawasan dan penyuluhan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dan surat berdomisili di daerah tersebut dan diduga mereka adalah penduduk tidak jelas identitas. (25/06/2015)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung kewalahan dalam menangani kasus perkembangan permukiman kumuh dapat dikatakan aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung kurang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan permukiman kumuh. Oleh sebab itu setiap kali ada penataan permukiman baik itu penggusuran permukiman akan sejalan dengan perpindahan tempat bermukim yang kumuh di daerah lain oleh masyarakat yang sama. Maka kesadaran masyarakat akan lingkungannya dalam

hal ini sangatlah dibutuhkan guna mencegah perkembangan permukiman kumuh di Kota Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung masih kurang maksimal. Dimana proses produksi sampai dengan hasil produksinya dan pemanfaatan produk Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung oleh masyarakat selama 2 tahun masih kurang efektif. Realisasi dari target yang ditentukan masih jauh dari harapan masyarakat dan begitu juga dengan harapan Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung tersebut.

   Dalam mencapai tujuan terlaksananya program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung, Pemerintah meng-anggarkan dana bagi suksesnya program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung, tidak adanya transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang kurang mengetahui adanya program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.
2. Efisiensi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung. Tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam penataan permukiman kumuh di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam pencapaian penggunaan sumber daya oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung kurang efesien.

   Dalam pencapaian target pada penataan permukiman kumuh sangat minim sekali atau sangat kurang efisien. Pada pencapaian program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang hampir berjalan 2 Tahun dari batas waktu yang ditentukan hanya bisa merealisasikan 12,5% saja atau sekitar 10 kawasan permukiman kumuh dari 150 kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam jangka 5 Tahun.
3. Tingkat kepuasan yang diperoleh organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada penataan permukiman kumuh di Kota Bandung. Tingkat kepuasan yang diperoleh oleh masyarakat dalam program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung, merupakan tingkat kepuasan yang didapatkan masyarakat dengan adanya penataan dan perbaikan kawasan permukiman masyarakat sehingga menjadi lebih fungsional, sedangkan tingkat kepuasan yang didapat oleh aparatur adalah jika suksesnya program Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tentang penataan permukiman kumuh di Kota Bandung ini berjalan dengan efektif. Program ini telah berjalan dengan baik tapi belum sepenuhnya efektif dimana tingkat kepuasan masyarakat juga masih kurang diperhatikan aparatur serta kepuasan aparatur juga belum sepenuhnya didapat.
4. Keadaptasian yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam penataan permukiman kumuh cukup berjalan dengan efektif. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam kriteria keadaptasian mengalami hal keragu-raguan atau tergantung tingkat kerumitan penataan permukiman tersebut. Pada pengambilan keputusan untuk melakukan penataan permukiman kumuh masih sangat tergantung kepada doktrin masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra.
5. Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam penataan permukiman kumuh di Kota Bandung sudah berjalan dengan sebagimana

semestinya akan tetapi pada pelaksanaannya belum terbilang cukup efektif. Dimana dalam pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung untuk pencegahan perluasan permukiman kumuh sangat kurang baik, dikarenakan pencegahan yang dilakukan tidak seimbang dengan peningkatan perluasan permukiman kumuh yang semakin Tahun meningkat. Faktor evaluasi dan pengawasan lapangan diperlukan akuntabilitas yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung harus menerapkan transparasi, sosialisasi serta lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan kawasan permukiman supaya masyarakat lebih mengetahui program penataan permukiman kumuh yang sedang berjalan di seluruh Kota Bandung.
2. Dalam pemanfaatan sumber daya untuk menunjang realisasi target penataan permukiman kumuh di Kota Bandung perlu dilakukan revisi dan memberbanyak kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dalam hal penataan permukiman. Untuk mewujudkan realisasi target yang telah ditentukan perlunya sosialisasi yang profesional yang dapat mempengaruhi dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.
3. Dalam program penataan permukiman perlu dijaga intensitas emosi aparatur. Dalam hal kepuasan masyarakat perlu diberikan bimbingan prosedur penataan permukiman kumuh agar masyarakat tidak merasa kebingungan ketika melakukan administrasi tentang penataan permukiman kumuh di Kota Bandung.
4. Aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung harus lebih mengoptimilisasikan kemampuannya. Pendekatan terhadap masyarakat sekitar kawasan permukiman kumuh sangat diperlukan dikarenakan berbagai informasi dapat diraih sesuai dengan perasaan atau keadaan masyarakat sekitar. Supaya dalam pengerjaan penataan permukiman kumuh dapat terwujud dengan baik dan optimal.
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung perlu untuk segara direvisi dan dievaluasi mengingat faktor perkembangan permukinan kumuh ini peningkatannya terlalu signifikan, oleh sebab itu program pencegahan perluasan permukiman kumuh akan lebih baik daripada mealakukan penanganan penataan permukiman kumuh. Aparatur yang berkerja untuk melakukan pengawasan terhadap permukiman di Kota Bandung untuk segera melakukan pekerjaannya secara totalitas dan profesianalisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arthur G. Gedeian dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka

Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT. Rineka Cipta.

David Kreeh, Richard S dan Egerton. 2004. *Individual and Society* (terjemahan Sudarwan Danim). Jakarta: Refika Aditama.

Dessler, Garry. (1997). *Manajemen Personalia "Teknik dan Konsep Modern*". Jakarta: Erlangga

Donnelly, Gibson dan ivancevich. 1993. *Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.

_____. 1992. *Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.

_____. 1989. *Organisasi, Edisi 8, Jilid I.* Jakarta : Binarupa Aksara.

Kodoatie, Robert. J dan Roestarn Sjarief, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bhumi Aksara.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P. 1997. *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi* Jakarta: CV Haji Mas Agung

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi* (terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.

Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen.* Yogyakarta: PT.Graha Ilmu

Sudarwan, Damin. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka.

B. Dokumen

Instruksi Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Bandung 2012.

Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2011-2031.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Daerah (Perda) Kota madya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/1980.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014- 2019.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman.

C. Rujukan Elektronik

http://distarcipkotabandung.org

Pemda. 2014. RPJMD 2014-2019 kota Bandung. Melalui http: //bandung.go.id/site/RPJMD_2014/Rancangan_Akhir_RPJMD_2014_02_16.pdf[15/3/15].

D. Jurnal

Raharjo. 2005. Permukiman kumuh. *Jurnal Teknologi lingkungan Semarang.* 142- 147.

Purwadhi. F. Sri Handayanti, dkk. 2002. Deteksi Permukiman Kumuh Dari Citra Saltelit KONOS (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional). *Jurnal FMIPA Jurusan Geografi Universitas Indonesia* 24:12-42.

E. Sumber Lain

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang*. Bandung: FISIP UNIKOM